PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA. STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUSTAM**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **440657**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 2.505.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/144 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 655.000.000
3. Tanah Seluas 7.152 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/160 m2 di KAB / KOTA SENGKANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah Seluas 8.000 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 207.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1,5 Tahun 2010, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 140.000.000
2. LAINNYA, POLIGON SEPEDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. LAINNYA, POLYGON XTRADA 5 LE Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, VESPA SKUTER MATIK SPRINT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 42.000.000

D. SURAT BERHARGA — Rp. ----

E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**21.447.175**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**2.775.447.175**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**330.000.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**2.445.447.175**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.